

Perbedaan Praktik Akuntansi Indonesia dan Vietnam

Natalis Christian^{✉1}, Fanny Derista², Jennifer³, Vivian Frederica⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Standar akuntansi internasional memainkan aspek krusial dalam menyelaraskan praktik akuntansi di berbagai negara. Hal ini menjadi landasan penting bagi perusahaan multinasional untuk menghasilkan laporan keuangan yang konsisten, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam regulasi dan praktik akuntansi di Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka sebagai teknik dalam pengumpulan data. Data penelitian diperoleh dari data sekunder yang tersedia dari artikel dan karya ilmiah di berbagai sumber online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antar kedua negara dalam penerapan standar akuntansi dimana Indonesia menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sementara Vietnam menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS). Hal tersebut mencerminkan pengaruh budaya, sejarah ekonomi, regulasi, kebijakan perpajakan dan standar pelaporan keuangan masing-masing negara. Setiap negara mengadopsi praktik akuntansi yang berbeda sesuai dengan standar kebijakan dan pedoman akuntansi yang berlaku di dalamnya. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik akuntansi antara Indonesia dan Vietnam, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang strategis, meningkatkan transparansi, keandalan, dan kepercayaan dalam laporan keuangan, serta mendukung aliran investasi dan kerja sama ekonomi yang lebih baik.

Kata Kunci: Indonesia, Vietnam, Praktik Akuntansi

Abstract

International accounting standards play a crucial role in harmonizing accounting practices across various countries. This forms an important foundation for multinational companies to produce financial statements that are consistent, transparent, and easily understood by users worldwide. This research aims to identify differences in accounting regulations and practices in Indonesia and Vietnam. The study employs a qualitative method using literature review as the data collection technique. Research data is obtained from secondary data available from articles and scholarly works in various online sources. The findings show fundamental differences between the two countries in the application of accounting standards, where Indonesia uses the Financial Accounting Standards (PSAK), while Vietnam uses the International Financial Reporting Standards (IFRS). This reflects the influence of each country's culture, economic history, regulations, tax policies, and financial reporting standards. Each country adopts different accounting practices according to the applicable policy standards and accounting guidelines. By understanding the differences and similarities in accounting practices between Indonesia and Vietnam, stakeholders can make strategic decisions, enhance transparency, reliability, and trust in financial reports, and support better investment flows and economic cooperation.

Keywords: Indonesia, Vietnam, Accounting Practice.

Copyright (c) 2024 Natalis Christian

[✉]Corresponding author : Natalis Christian

Email Address : natalis.christian@uib.ac.id, 2142020.fanny@uib.edu, 21420245.jennifer@uib.edu,
2142068.vivian@uib.edu

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengantarkan dunia pada era perdagangan yang menjadi salah satu pendorong penggunaan praktik akuntansi internasional (Tyas et al., 2023). Perusahaan-perusahaan untuk berekspansi ke berbagai negara, membuka peluang investasi dan kerjasama lintas batas. Hampir seluruh perusahaan, termasuk perusahaan lokal kini terlibat dalam transaksi internasional, mereka dihadapkan pada kompleksitas standar akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara (Goncharova, 2020). Ketidakteragaman ini dapat menimbulkan hambatan dalam pengambilan keputusan, menyulitkan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan, dan menghambat kelancaran arus perdagangan internasional (Diphayana, 2018). Dinamika ini memicu kebutuhan akan standar akuntansi yang bersifat internasional untuk menyelaraskan praktik akuntansi di berbagai negara (Manoj et al., 2023).

Standar akuntansi internasional muncul dalam menghasilkan laporan keuangan yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna di berbagai negara (Saveleva, 2021). Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan multinasional, serta mendorong efisiensi pasar modal global. Di tengah kebutuhan akan standar akuntansi internasional, *International Financial Reporting Standards (IFRS)* muncul sebagai solusi yang komprehensif (Ertuğrul, 2019). *IFRS* merupakan seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan dan dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)* (*IFRS Accounting*, 2016). Standar ini telah diadopsi oleh lebih dari 195 negara di seluruh dunia, menjadikannya standar akuntansi global yang paling diakui dan digunakan secara luas (Song, 2020).

Setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga standar akuntansi internasional perlu diadaptasi agar sesuai faktor ekonomi dan politik negara tersebut (Djambakieva, 2021). Di Indonesia, standar akuntansi yang diterapkan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Standar Akuntansi Keuangan, 2015). Standar ini secara bertahap disesuaikan dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan secara internasional (Standar Akuntansi Keuangan, 2015). Proses konvergensi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap praktik akuntansi global yang lebih harmonis, meskipun masih terdapat penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mengakomodasi kondisi lokal dan kebutuhan spesifik industri.

Sementara itu, Vietnam mengimplementasikan standar akuntansi *Vietnamese Accounting Standards (VAS)* yang diatur oleh Kementerian Keuangan Vietnam (Shira, 2021). *VAS* juga bergerak menuju konvergensi dengan *IFRS*, namun dengan pendekatan yang lebih bertahap dan selektif (A. T. Nguyen & Gong, 2014). Hal ini mencerminkan upaya Vietnam untuk menyeimbangkan antara adopsi standar internasional dan pemeliharaan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Perbedaan pendekatan dalam mengadopsi *IFRS* ini memicu adanya perbedaan antara standar akuntansi Indonesia dan Vietnam. Adanya tantangan bagi investor, terutama investor asing yang dihadapkan pada kesulitan menganalisis laporan keuangan perusahaan di kedua negara tersebut.

Bagi calon investor dari Vietnam yang ingin berinvestasi di perusahaan Indonesia, laporan keuangan yang disajikan di Indonesia tidak dapat dianalisis dengan metode yang sama dengan analisis laporan keuangan di Vietnam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan standar akuntansi yang digunakan (Polzer et al., 2022). Perbedaan ini mengharuskan pengguna laporan keuangan untuk memiliki pemahaman terhadap standar akuntansi di kedua negara agar dapat menginterpretasikan dan mengambil keputusan dari informasi keuangan dengan tepat (Hajdari, 2019). Kurangnya pemahaman dapat meningkatkan risiko investasi dan menghambat arus investasi asing antar investor Indonesia maupun Vietnam.

Dengan adanya upaya dalam mengatasi tantangan ini, diharapkan Indonesia dan Vietnam dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi investor asing, dan

mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara (Chauhan & Kumar, 2019). Namun, dari riset yang dilakukan penelitian mengenai perbandingan standar akuntansi di Indonesia dan Vietnam masih tergolong minim, dan penelitian yang mendalam masih jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika akuntansi di kedua negara, terutama dalam konteks perbedaan pencatatan laporan keuangan maupun kebijakan regulasi masih terbatas. Oleh karena itu, melalui penelitian komparatif ini mengenai standar akuntansi di Indonesia dan Vietnam, diharapkan para investor maupun perusahaan multinasional dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perbandingan standar akuntansi negara Indonesia dan Vietnam.

Faktor Perbedaan Praktik Akuntansi antara Negara

Perbedaan praktik akuntansi di Indonesia dan Vietnam dapat ditelusuri dari beberapa faktor, sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Sistem hukum yang berbeda antara kedua negara mempengaruhi regulasi dan standar akuntansi. Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum campuran, memberikan latar belakang yang berbeda dalam penerapan standar akuntansi, sedangkan Vietnam memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum sipil (Doan et al., 2020; Wardhani et al., 2022).

2. Faktor Lingkungan

Indonesia dan Vietnam sama-sama telah mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, namun perbedaan dalam kecepatan adopsi dan penyesuaian dengan standar lokal menciptakan varian dalam praktik akuntansi (Nguyễn Thị Hải Hà và cộng sự, 2022; Yanti & Ramziah, 2023).

3. Faktor Budaya

Pengaruh budaya juga berperan dalam cara praktik akuntansi dijalankan di kedua negara. Misalnya, budaya kerja, negosiasi bisnis, dan tingkat transparansi keuangan bisa berbeda, berpengaruh pada pelaporan dan analisis finansial. Selain itu, sejarah ekonomi Indonesia dan Vietnam yang unik berdampak pada perkembangan infrastruktur keuangan dan regulasi mereka, termasuk praktik akuntansi (Bernadetta Diana Nugraheni & Cyrillius Martono, 2023; Le et al., 2020).

4. Faktor Perpajakan

Perpajakan di Vietnam memiliki kebijakan perpajakan yang ketat terkait dengan dokumen dan pendaftaran pajak, yang harus memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, meskipun juga mengikuti prosedur yang ketat, ada lebih banyak ruang untuk interpretasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan, khususnya terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Perbedaan perpajakan di kedua negara juga menjadi salah satu faktor perbedaan praktik akuntansi, di Indonesia mengikuti prosedur yang ketat, ada lebih banyak ruang untuk interpretasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan, khususnya terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengeluaran (Amrin et al., 2021). Sedangkan di Vietnam memiliki kebijakan perpajakan yang ketat terkait dengan dokumen dan pendaftaran pajak, yang harus memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah (Hamdani & Husain, 2023).

Perbedaan ini mencerminkan bagaimana praktik akuntansi di kedua negara tidak hanya dipengaruhi oleh standar internasional, tetapi juga oleh faktor domestik seperti perpajakan, budaya, dan regulasi hukum.

PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah kerangka kerja akuntansi yang dianut di Indonesia. PSAK merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang digunakan oleh entitas bisnis di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan (Tri Wahyuni et al., 2020). PSAK dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah

naungan Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK). Tujuan utama dari penerapan PSAK adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, kreditor, dan pemerintah. Prinsip-prinsip dasar PSAK meliputi prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, konsistensi, dan prinsip objektivitas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah kerangka kerja akuntansi yang dianut di Indonesia. PSAK merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang digunakan oleh entitas bisnis di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan (Tri Wahyuni et al., 2020). PSAK dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah naungan Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK). Tujuan utama dari penerapan PSAK adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, kreditor, dan pemerintah. Prinsip-prinsip dasar PSAK meliputi prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, konsistensi, dan prinsip objektivitas (Maak et al., 2016).

Secara spesifik, PSAK mencakup berbagai aspek dalam akuntansi, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan yang harus dilakukan entitas dalam laporan keuangannya dan berbagai transaksi dan kejadian keuangan, antara lain seperti pengakuan pendapatan, akuntansi aset dan kewajiban, penyajian laporan keuangan, serta pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Dengan demikian, setiap entitas yang menerapkan PSAK diwajibkan untuk mengikuti pedoman tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi prinsip relevan, dapat diandalkan, konsisten, dan dapat dibandingkan (Wulandari et al., 2023).

Pelaksanaan PSAK di Indonesia diwajibkan bagi entitas-entitas tertentu seperti perusahaan publik, lembaga keuangan, dan beberapa entitas yang memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh regulator atau standar akuntansi itu sendiri. Penerapan PSAK diharapkan dapat membantu entitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang berlaku secara lokal tapi juga memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan standar akuntansi internasional. Selain itu, pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para investor dan stakeholders terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan (Indonesia, 2024a).

IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah serangkaian pedoman akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangan di berbagai negara, memungkinkan perbandingan yang adil antara perusahaan-perusahaan di seluruh dunia (Palea, 2018). Hal ini memungkinkan investor, pihak berkepentingan, dan pasar saham di seluruh dunia untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan lebih mudah, yang mendukung investasi dan keputusan ekonomi yang lebih informasi (Mita et al., 2018).

IFRS mencakup berbagai aspek akuntansi, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Banyak negara telah mengadopsi *IFRS*, baik secara penuh maupun dengan penyesuaian lokal. Prinsip-prinsip dasar *IFRS* mencakup kehati-hatian, substansi atas bentuk, pengakuan pendapatan saat terdapat kepastian arus kas masa depan, dan nilai wajar (Soderstrom & Sun, 2016). Standar ini secara teratur direvisi dan diperbarui oleh *IASB* untuk memperhitungkan perkembangan dalam praktik akuntansi dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Transisi ke *IFRS* dapat menjadi proses yang kompleks, melibatkan pelatihan personel dan penyesuaian sistem informasi. Namun, penerapan *IFRS* telah membantu mempromosikan transparansi, keandalan, dan perbandingan yang lebih mudah antara laporan keuangan di tingkat global. *IFRS* mencakup berbagai aspek akuntansi, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Banyak negara telah mengadopsi *IFRS*, baik secara penuh maupun

dengan penyesuaian lokal. Prinsip-prinsip dasar *IFRS* mencakup kehati-hatian, substansi atas bentuk, pengakuan pendapatan saat terdapat kepastian arus kas masa depan, dan nilai wajar (Soderstrom & Sun, 2016). Standar ini secara teratur direvisi dan diperbarui oleh *IASB* untuk memperhitungkan perkembangan dalam praktik akuntansi dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Transisi ke *IFRS* dapat menjadi proses yang kompleks, melibatkan pelatihan personel dan penyesuaian sistem informasi. Namun, penerapan *IFRS* telah membantu mempromosikan transparansi, keandalan, dan perbandingan yang lebih mudah antara laporan keuangan di tingkat global (De George et al., 2016).

Penerapan *IFRS* di Vietnam membawa tantangan dan peluang bagi perekonomian negara. Vietnam telah berkomitmen untuk mengadopsi *IFRS* sepenuhnya sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan, membantu perusahaan Vietnam memperluas akses mereka ke pasar modal internasional, dan memperkuat lingkungan investasi (Thi et al., 2020). Selain itu, hal ini memberikan kesempatan bagi praktisi akuntansi Vietnam untuk meningkatkan kualifikasi profesional mereka dan bekerja dalam lingkungan global. Walaupun tantangannya cukup besar, potensi manfaat dari penuhnya implementasi *IFRS* di Vietnam sangat signifikan, baik bagi ekonomi nasional maupun bagi posisi Vietnam dalam perekonomian global (Dao & Hoang, 2023).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan data yang digunakan dalam penelitian bersifat sekunder, dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, buku, dan situs web resmi. Data sekunder mencakup informasi statistik dan informasi lain yang relevan dengan standar akuntansi di Vietnam dan Indonesia. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara standar akuntansi di kedua negara. Objek penelitian ini adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Vietnam. Peneliti akan berfokus pada perbandingan penyusunan laporan keuangan dan metode pencatatan akuntansi di kedua negara. Metodologi penelitian ini dipilih bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kaya informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis deskriptif kualitatif kemudian digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perbedaan standar akuntansi di Indonesia dan Vietnam, serta implikasinya bagi praktik akuntansi di kedua negara. Selanjutnya, tahap seleksi data dilakukan dengan analisis yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Akuntansi di Indonesia dan Vietnam

Sejarah Akuntansi di Indonesia

Sejarah akuntansi di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke-17. Pada tahun 1642, sistem pembukuan mulai dikenal di Indonesia, terutama melalui pengaruh Belanda dan Portugis yang memperkenalkan metode pencatatan keuangan. Pembukuan awal ini berfokus pada perhitungan untung dan rugi dari hasil perdagangan, mengikuti praktik para pedagang asing yang telah terbukti efektif dalam memantau dan mengelola keuangan bisnis mereka. Metode ini membantu para pedagang untuk secara sistematis mencatat transaksi perdagangan mereka, memungkinkan mereka untuk menghitung laba dan rugi secara akurat (Nawang Sari & Hanun, 2020). Pada tahun 1747, sistem pembukuan ganda atau *double entry bookkeeping* yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli mulai diterapkan di Indonesia. Sistem pembukuan ganda adalah salah satu kontribusi terbesar dari Luca Pacioli dalam dunia akuntansi. Sistem ini memperkenalkan prinsip dasar bahwa setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi dua akun atau lebih dalam buku besar, dengan satu akun didebit dan akun lainnya dikredit. Prinsip ini membantu memastikan bahwa catatan keuangan tetap seimbang dan akurat. Di Indonesia, praktik pembukuan ganda pertama kali

diadopsi oleh Amphioen Sociëteit, sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta pada masa itu. Sistem pembukuan ganda tidak hanya berguna untuk mencatat transaksi perdagangan dengan lebih akurat, tetapi juga memungkinkan para pedagang untuk secara sistematis menghitung keuntungan dan kerugian mereka.

Pada tahun 1870, dihapusnya sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi di Hindia Belanda. Sistem tanam paksa sebelumnya memaksa penduduk pribumi untuk menanam dan memproduksi tanaman komoditas tertentu untuk kepentingan kolonial, tanpa memperhitungkan keuntungan bagi penduduk lokal (Putra et al., 2023). Setelah dihapusnya sistem tanam paksa, pengusaha Belanda mulai menginvestasikan modal secara langsung di Indonesia. Hal ini membawa masuknya modal dan teknologi yang lebih maju ke wilayah ini. Salah satu aspek penting dari investasi ini adalah penerapan sistem akuntansi yang lebih terstruktur. Pada tahun 1907, seorang tokoh bernama Van Schagen memperkenalkan praktik *auditing* di Hindia Belanda (Tandiono et al., 2023). *Auditing* adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas, untuk memastikan kebenaran dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan (Jeppesen, 2019). Langkah ini sangat penting karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis di Hindia Belanda pada saat itu.

Sejarah penggunaan sistem akuntansi Anglo-Saxon di Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah peristiwa konfrontasi Irian Barat pada tahun 1957. Peristiwa ini menyebabkan banyak pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda dipulangkan ke tanah air. Beberapa dari mereka memilih untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, di mana mereka memperoleh pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi. Para pelajar yang kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika membawa kembali pengalaman dan pengetahuan tentang sistem akuntansi berbasis Anglo-Saxon. Sistem ini berbeda dengan sistem akuntansi berbasis kontinental yang sebelumnya dominan di Indonesia, karena lebih menekankan pada pengakuan pendapatan dan biaya saat terjadi (*recognition principle*) dan konservatisme dalam pengukuran (*conservatism in measurement*). Penggunaan sistem akuntansi Anglo-Saxon di Indonesia mulai meningkat seiring dengan masuknya investasi asing yang signifikan pada periode pasca-kemerdekaan (Wardoyo et al., 2023). Modal asing ini membawa teknologi dan standar manajemen yang lebih maju, termasuk praktik akuntansi yang lebih modern.

Pada masa penjajahan Jepang, perkembangan akuntansi di Indonesia mengalami stagnasi karena tidak ada kontribusi baru terhadap sistem akuntansi yang sudah ada. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai membangun kembali fondasi akuntansinya. Pada tahun 1952, Universitas Indonesia membuka jurusan akuntansi, yang menjadi langkah awal dalam pendidikan formal akuntansi di Indonesia (Amrih et al., 2024). Pendirian jurusan ini menjadi tonggak penting karena menyediakan pendidikan khusus untuk calon akuntan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan administratif negara yang baru merdeka. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1957 dengan didirikannya IAI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para akuntan di Indonesia (Andriani et al., 2022). Pendirian IAI menandai langkah penting dalam pengembangan akuntansi nasional karena menyatukan dan mengatur standar profesi serta etika yang harus diikuti oleh para praktisi akuntansi di Indonesia. Keberadaan IAI juga memberikan wadah bagi para akuntan untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang akuntansi.

Sejak itu, sistem akuntansi Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan. Pada tahun 1973, Indonesia menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) sebagai standar akuntansi pertama yang disesuaikan dengan kondisi lokal. PAI menetapkan pedoman yang jelas untuk penyusunan laporan keuangan, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan. Pada tahun 1994, PAI direvisi untuk menyesuaikan dengan *International Accounting Standards Committee (IASC)*, yang sekarang dikenal sebagai *International Accounting*

Standards Board (IASB). Revisi ini dilakukan untuk mengharmonisasi praktik akuntansi nasional dengan standar internasional yang diakui secara global. Tahun 2008 ditandai dengan komitmen Indonesia untuk mendukung pencapaian "*One Global Accounting Standard*", menunjukkan dorongan untuk mengadopsi standar akuntansi internasional secara lebih konsisten. Fase konvergensi dimulai pada tahun 2012, dengan SAK yang mulai efektif pada 1 Januari 2012, mengikuti konvergensi dengan *IFRS Standards* yang efektif sejak 1 Januari 2009. Proses konvergensi terus berlanjut, dengan fase kedua dimulai pada tahun 2015, ketika SAK menjadi efektif pada 1 Januari 2015, sesuai dengan *IFRS Standards* yang efektif sejak 1 Januari 2014 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024).

Pada tahun 2016, sebuah pernyataan bersama dikeluarkan oleh IAI, OJK, dan *IFRS Foundation*, menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Langkah selanjutnya dalam proses konvergensi terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dengan SAK yang efektif berturut-turut pada 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2018, sesuai dengan *IFRS Standards* yang masing-masing efektif pada 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2017. Pada tahun 2019, terobosan lain terjadi dengan peluncuran SAK secara *online*, meningkatkan aksesibilitas dan keandalan standar bagi para praktisi akuntansi. Proses konvergensi mencapai tahap puncaknya pada tahun 2021 dan 2022, dengan SAK yang efektif berturut-turut pada 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2022, sesuai dengan *IFRS Standards* yang efektif masing-masing pada 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2021. Dengan demikian, perjalanan pengembangan PSAK di Indonesia menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesesuaian dan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional, memperkuat transparansi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024).

Sejarah Akuntansi di Vietnam

Sejarah akuntansi di Vietnam dapat ditelusuri kembali ke periode kolonial Prancis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Imanuel et al., 2023). Pada masa ini, sistem akuntansi yang digunakan di Vietnam sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik akuntansi Prancis. Sistem ini umumnya mengikuti standar Eropa dengan pembukuan *double-entry* dan fokus pada penyusunan laporan keuangan yang terstruktur. Setelah kemerdekaan Vietnam pada tahun 1945 dan terutama setelah reunifikasi pada tahun 1975, Vietnam beralih ke sistem ekonomi terencana yang dipimpin oleh pemerintah komunis (Li, 2023). Selama periode ini, akuntansi di Vietnam lebih berfokus pada pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian ekonomi oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perencanaan ekonomi makro dan mengendalikan sumber daya nasional, bukan untuk memberikan informasi keuangan yang relevan kepada publik atau investor.

Pada akhir 1980-an, Vietnam mengalami perubahan besar dengan diperkenalkannya kebijakan *Đổi Mới* pada tahun 1986 (Lenzi, 2022). Kebijakan ini merupakan tonggak awal dalam perjalanan transisi Vietnam dari ekonomi terencana menuju ekonomi pasar. *Đổi Mới* bertujuan untuk mereformasi berbagai sektor ekonomi yang terpengaruh, termasuk sistem akuntansi. Reformasi *Đổi Mới* membawa dampak signifikan terhadap praktik akuntansi di Vietnam. Pada awal tahun 1990-an, Vietnam mulai mengembangkan dan menerapkan standar akuntansi nasional yang dikenal sebagai *Vietnamese Accounting Standards (VAS)* (Hoang & Joseph, 2019). Standar ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di Vietnam. Implementasi VAS bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Langkah ini mencerminkan komitmen Vietnam untuk berintegrasi dengan ekonomi global dan memenuhi standar internasional dalam praktik akuntansi. Perubahan ini juga mencerminkan respons terhadap kebutuhan akan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan terpercaya, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan investasi asing di Vietnam.

Pada tahun 2003, memulai langkah signifikan dengan memperkenalkan standar yang lebih sejalan dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* (Phu & Lan, 2021). Proses ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing ke Vietnam dan mempercepat integrasi ekonomi negara ini dengan ekonomi global. Dengan mengadopsi standar yang diakui secara internasional seperti *IFRS*, Vietnam berusaha untuk meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap laporan keuangan perusahaan di negara ini, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2005, Vietnam secara resmi mengadopsi beberapa standar *IFRS* ke dalam VAS. Meskipun demikian, adaptasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik khusus ekonomi Vietnam. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang diterapkan tetap relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktik bisnis di Vietnam. Hingga saat ini, Vietnam terus memperbarui dan menyesuaikan standar akuntansinya untuk lebih selaras dengan praktik internasional. Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan dapat diandalkan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat posisi Vietnam dalam pasar global.

Landasan Hukum Akuntansi di Indonesia dan Vietnam

Landasan Hukum Akuntansi di Indonesia

Landasan hukum akuntansi di Indonesia diterapkan sesuai beberapa peraturan dan undang-undang yang menjamin praktik akuntansi berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Fandi Prasetya, 2023). Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur tentang keharusan pelaporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar di pasar modal (Pohan et al., 2023). Pelaporan ini harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (Subhan, 2023). Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan tentang kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada pemegang saham. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor independen untuk menjamin kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan. Peraturan ini dikuatkan lebih lanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mencakup ketentuan tentang bukti pencatatan akuntansi sebagai dasar perhitungan pajak (Adiputra, 2019). Keseluruhan landasan hukum ini menciptakan kerangka kerja bagi praktik akuntansi di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pemerintah dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan (Budianto et al., 2023).

Landasan Hukum Akuntansi di Vietnam

Akuntansi di Vietnam tentu saja diatur melalui serangkaian landasan hukum yang mencakup undang-undang, standar, dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan profesional terkait. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keandalan, dan konsistensi laporan keuangan, serta untuk mendukung lingkungan bisnis yang sehat dan memenuhi standar internasional (Dinh & Tri, 2023). Landasan hukum Vietnam dalam bidang akuntansi sangat penting bagi pengaturan dan implementasi praktik akuntansi yang efektif di negara tersebut. Salah satu elemen kunci dalam landasan hukum ini adalah Undang-Undang Akuntansi yang dirilis pada tahun 2003 dan mengalami revisi pada tahun 2015. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Majelis Nasional, bertindak sebagai dasar hukum utama untuk praktik akuntansi di Vietnam, menetapkan kerangka kerja untuk pencatatan, penyimpanan, pemrosesan, dan pelaporan informasi keuangan (Thanh et al., 2020). Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban subjek hukum, termasuk entitas bisnis dan akuntan profesional, untuk menjalankan fungsi akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku (Duy & Tran, 2021).

Negara Vietnam juga mengadopsi *Vietnamese Accounting Standards (VAS)* pada awal tahun 2000-an. Berlandaskan pada *IFRS*, VAS membahas berbagai aspek implementasi akuntansi mulai dari pengakuan aset dan kewajiban hingga laporan laba rugi dan pengukuran nilai wajar. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa praktik akuntansi di Vietnam selaras dengan standar global, mempromosikan kredibilitas dan transparansi (D. T. Nguyen et al., 2022). Tentu juga, Vietnam juga mengembangkan *Vietnamese Financial Reporting Standards (VFRS)*, yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Kerangka peraturan dan panduan ini dirancang untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Vietnam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam laporan keuangan, memfasilitasi perbandingan antar perusahaan, dan memperkuat kepercayaan investor serta pemangku kepentingan lainnya (V. T. H. Nguyen et al., 2023). Dengan demikian, *VFRS* memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas di Vietnam.

Organisasi Akuntansi di Indonesia dan Vietnam

Organisasi Akuntansi di Indonesia

Di Indonesia, dua organisasi utama yang memiliki peran signifikan dalam pengembangan dan pengaturan bidang akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) (Purba & Dewayanto, 2023). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan lembaga profesi yang menjadi wadah bagi para akuntan di Indonesia. IAI didirikan pada tahun 1957 dan bertujuan untuk meningkatkan standar profesi akuntansi di Indonesia. Salah satu fungsi utama IAI adalah menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. SAK merupakan standar akuntansi yang disesuaikan dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* dan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan entitas di Indonesia. IAI juga berperan dalam mengembangkan kompetensi akuntan melalui pendidikan, pelatihan, serta advokasi untuk meningkatkan kualitas layanan akuntansi di Indonesia. Selanjutnya, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) adalah organisasi yang fokus pada pengembangan praktik dan penelitian di bidang akuntansi manajemen. IAMI didirikan untuk memajukan ilmu dan praktik akuntansi manajemen di Indonesia dengan mendorong standar-standar yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan bisnis. IAMI memberikan wadah bagi para praktisi dan akademisi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta berperan dalam menyediakan bimbingan teknis dalam pengelolaan dan pengembangan bidang akuntansi manajemen di Indonesia. Kedua organisasi ini memainkan peran penting dalam mengatur, mengembangkan, dan meningkatkan profesionalisme serta kualitas layanan akuntansi di Indonesia. Dengan adopsi standar internasional dan fokus pada pengembangan kompetensi, baik IAI maupun IAMI berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor akuntansi di Indonesia.

Organisasi Akuntansi di Vietnam

Di Vietnam, dua organisasi utama yang berperan dalam mengatur dan mengembangkan bidang akuntansi adalah *Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA)* dan *Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA)* (International Federation of Accountants, 2024). *Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA)* didirikan sebagai wadah bagi para akuntan dan auditor di Vietnam untuk berpartisipasi dalam pengembangan profesi akuntansi. VAA memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, serta standarisasi praktik akuntansi dan audit di negara ini. Organisasi ini juga aktif dalam menyediakan bimbingan dan dukungan kepada para anggotanya dalam meningkatkan kualitas layanan akuntansi dan audit. Sementara itu, *Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA)* berfokus pada membina dan mengembangkan akuntan publik bersertifikasi di Vietnam. VACPA mengatur proses sertifikasi bagi para akuntan publik dan memastikan bahwa anggotanya mematuhi standar etika dan praktik profesi yang tinggi. Organisasi ini juga berperan dalam menyusun

panduan dan pedoman praktik akuntansi yang sesuai dengan standar internasional, seperti *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, untuk meningkatkan transparansi dan keandalan informasi keuangan di Vietnam. Kedua organisasi ini memainkan peran krusial dalam mempromosikan profesionalisme dan meningkatkan standar akuntansi serta audit di Vietnam, sesuai dengan tuntutan globalisasi ekonomi dan integrasi pasar yang semakin meningkat.

Sertifikasi Akuntansi di Indonesia dan Vietnam

Sertifikasi Akuntansi di Indonesia

Di Indonesia, sertifikasi akuntansi adalah indikator yang krusial untuk menunjukkan tingkat kompetensi dan keahlian dalam berbagai aspek akuntansi (Chandra & Junita, 2021; Edi et al., 2020). Salah satunya adalah Sertifikat Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), memvalidasi pengetahuan mendalam dalam prinsip-prinsip akuntansi syariah untuk profesional di bidang tersebut. Certified Public Accountant (CPA) dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang diakui secara internasional dan menunjukkan kemampuan untuk bekerja dalam praktik akuntansi publik. Certified Internal Auditor (CIA) dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), memberikan sertifikasi untuk para auditor internal yang ingin menunjukkan keahlian dalam audit internal organisasi. Qualified Internal Auditor (QIA) dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), menegaskan kompetensi auditor internal dalam lingkungan bisnis. Chartered Financial Analyst (CFA), dikeluarkan oleh CFA Institute, menetapkan standar bagi profesional di bidang analisis keuangan dan investasi. Certified Management Accountant (CMA), dikeluarkan oleh Institute for Certified Management Accountant (ICMA), menunjukkan kemampuan dalam manajemen akuntansi. Terakhir, Certified Accurate Professional (CAP) yang diakui secara nasional, bersama dengan Association of Chartered Certified Accountant (ACCA) yang diakui secara internasional adalah sertifikasi yang memberikan penilaian atas kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan yang lebih luas. Setiap sertifikasi ini memerlukan pendidikan, pengalaman, serta melewati ujian atau evaluasi yang ketat untuk memastikan pemegang sertifikasi memenuhi standar profesional yang ditetapkan dan dapat berkontribusi dalam bidang mereka dengan baik (Pramudya, 2023).

Sertifikasi Akuntansi di Vietnam

Di Vietnam, terdapat beberapa sertifikasi akuntansi yang penting untuk menunjukkan kompetensi dan kredibilitas dalam berbagai bidang akuntansi. Pertama, Certified Public Accountant (CPA) yang dikeluarkan oleh Vietnamese Association of Certified Public Accountants (VACPA). Sertifikasi ini menunjukkan kemampuan untuk bekerja dalam praktik akuntansi publik, memberikan jasa audit, perpajakan, konsultasi, dan lainnya. Kedua, Certified Internal Auditor (CIA) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). Sertifikasi ini menilai kompetensi dalam audit internal organisasi, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional. CIA Vietnam diperlukan untuk auditor internal yang ingin menunjukkan kemampuan dan profesionalisme dalam praktik audit. Selanjutnya, Association of Chartered Certified Accountant (ACCA) menyediakan sertifikasi yang diakui secara global dalam bidang akuntansi dan keuangan. ACCA Vietnam memberikan pengetahuan luas tentang praktik akuntansi internasional, manajemen keuangan, dan strategi bisnis, serta menetapkan standar profesional yang tinggi bagi anggotanya. Terakhir, Certified Management Accountant (CMA) yang dikeluarkan oleh Institute for Certified Management Accountant (ICMA), menunjukkan kemampuan dalam manajemen akuntansi, termasuk perencanaan keuangan, analisis biaya, pengambilan keputusan investasi, dan strategi bisnis. CMA Vietnam mengakui profesional yang memiliki keahlian dalam membantu organisasi mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan (International Federation of Accountants, 2024).

Perbedaan Praktik Akuntansi di Indonesia dan Vietnam

Indonesia dan Vietnam, dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, memiliki kesamaan dalam hal tujuan untuk meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan melalui adopsi standar akuntansi internasional. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi acuan utama. SAK secara bertahap diharmonisasi dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan di ranah global. Upaya konvergensi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap praktik akuntansi global yang lebih terstandarisasi. Sementara itu, Vietnam mengadopsi *Vietnamese Accounting Standards (VAS)* yang diatur oleh Kementerian Keuangan Vietnam. VAS juga bergerak ke arah konvergensi dengan *IFRS*, namun dengan langkah yang lebih hati-hati dan selektif. Pendekatan ini mencerminkan keinginan Vietnam untuk menyeimbangkan antara adopsi standar internasional dan mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dari kedua negara ini, terdapat perbedaan mendasar mengenai tata cara pencatatan laporan keuangan yang dianut masing-masing negara dalam mengimplementasikan standar akuntansi tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Standar Akuntansi Indonesia dan Vietnam

| Aspek | Indonesia (PSAK) | Vietnam (VAS) |
|--|---|--|
| Klasifikasi Aset (Laporan Posisi Keuangan) | PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang "Aset Tetap" menjelaskan panduan umum mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap. | VAS No. 3 tentang " <i>Tangible Fixed Assets</i> " dan VAS No. 4 tentang " <i>Intangible Fixed Assets</i> " mengklasifikasikan aset secara khusus berfokus pada aset tetap berwujud dan tidak berwujud. |
| Penyajian Aset dan Liabilitas | PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" memungkinkan penyajian dalam urutan likuiditas atau klasifikasi lain yang lebih informatif. | VAS No. 1 tentang " <i>General Standard</i> " mewajibkan penyajian dalam urutan likuiditas (<i>current-then-non-current</i>). VAS No. 1 menekankan pentingnya penyajian yang jelas dan teratur dalam memahami likuiditas dan solvabilitas entitas. |
| Penyajian Beban (Laporan Laba Rugi) | PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" mewajibkan penyajian beban berdasarkan fungsi atau sifat. | VAS No. 1 tentang " <i>General Standard</i> " memberikan panduan umum mengenai penyajian beban berdasarkan fungsi atau sifat, namun tidak mengatur secara rinci. |
| Penghasilan Komprehensif Lain | PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" mewajibkan penyajian komponen pendapatan dan beban komprehensif lain secara terpisah di luar laba rugi. | VAS No. 1 tentang " <i>General Standard</i> " tidak mewajibkan penyajian komponen pendapatan dan beban komprehensif lain secara terpisah, namun memperbolehkannya. |
| Properti Investasi | PSAK No. 13 tentang "Properti Investasi" mewajibkan pengukuran dengan model biaya atau model nilai wajar. | VAS 5 tentang " <i>Investment Properties</i> " hanya memperbolehkan pengukuran dengan menggunakan model biaya. |

| | | |
|-------------------|--|--|
| Metode Inventaris | PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang "Persediaan" memungkinkan penggunaan metode <i>FIFO</i> , rata-rata tertimbang, dan metode khusus lainnya. | VAS No. 2 tentang "Inventories" hanya memperbolehkan penggunaan metode <i>FIFO</i> dan rata-rata tertimbang. |
|-------------------|--|--|

Sumber: Data Sekunder Diolah (2024)

Perbandingan antara PSAK dan VAS menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap klasifikasi aset, penyajian laporan keuangan, dan metode akuntansi spesifik. Dalam segi pengukuran klasifikasi aset (laporan posisi keuangan), PSAK 16 (Revisi 2011) tentang "Aset Tetap" memberikan panduan umum mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap, termasuk prinsip-prinsip yang berlaku untuk menentukan biaya aset tetap dan bagaimana cara mengklasifikasikannya. Sedangkan VAS No. 3 tentang "*Tangible Fixed Assets*" dan VAS No. 4 tentang "*Intangible Fixed Assets*" mengklasifikasikan aset secara khusus mengklasifikasikan pada aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan tidak berwujud (*intangible fixed assets*) dengan memberikan panduan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset dalam laporan keuangan (Edi & Wati, 2022).

Dalam segi pengukuran penyajian aset dan liabilitas, PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" memungkinkan penyajian dalam urutan likuiditas atau klasifikasi lain yang lebih informatif. PSAK No. 1 memberikan panduan umum mengenai penyajian laporan keuangan, termasuk bagaimana aset dan liabilitas harus diklasifikasikan. Entitas dapat menyajikan aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas jika mereka merasa ini lebih informatif bagi para pengguna laporan keuangan mereka. Disisi lain, VAS No. 1 tentang "*General Standard*" mewajibkan penyajian dalam urutan likuiditas (*current-then-non-current*). VAS No. 1 lebih menekankan pentingnya penyajian yang jelas dan teratur untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami likuiditas dan solvabilitas entitas. Perusahaan di Vietnam umumnya diwajibkan untuk menyajikan aset dan liabilitas mereka dalam urutan likuiditas, yang berarti aset lancar diikuti oleh aset tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek diikuti oleh liabilitas jangka panjang.

Dalam segi pengukuran penyajian beban (laporan laba rugi), PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" mewajibkan menyajikan beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan salah satu dari dua pendekatan yaitu berdasarkan fungsi atau sifat. Namun, VAS No. 1 tentang "*General Standard*" memberikan panduan umum, tidak mengatur secara rinci. VAS No. 1 berfungsi sebagai panduan umum untuk penyajian laporan keuangan tanpa memberikan aturan yang terlalu rinci, memungkinkan fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing entitas.

Dalam segi pengukuran penghasilan komprehensif lain, PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" mewajibkan penyajian komponen pendapatan dan beban komprehensif lain secara terpisah di luar laba rugi. PSAK 1 mengharuskan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai laporan keuangan tunggal atau sebagai dua laporan terpisah. Disisi lain, VAS No. 1 tentang "*General Standard*" memang memberikan panduan mengenai penyajian pendapatan dari kegiatan operasional entitas. Namun, tidak secara khusus mewajibkan penyajian pendapatan dan beban komprehensif lain secara terpisah, tetapi memberikan keleluasaan bagi entitas untuk melakukan penyajian tersebut jika dianggap relevan dan informatif.

Dalam segi pengukuran pengukuran properti investasi, PSAK No. 13 yang mengatur tentang "Properti Investasi" mewajibkan pengukuran dengan model biaya atau model nilai wajar. PSAK No. 13 memberikan fleksibilitas untuk memilih antara model

biaya (*cost model*) atau model nilai wajar (*fair value model*), tergantung pada kebutuhan dan strategi manajemen dalam pengelolaan properti investasi tersebut. Sementara untuk VAS No. 5 tentang "Properti Investasi" hanya memperbolehkan model biaya. VAS No. 5 yang mengatur bahwa properti investasi hanya boleh diukur dengan model biaya setelah pertama kali diakui dalam laporan keuangan entitas. Dengan demikian VAS 5 tidak memperbolehkan penggunaan model nilai wajar (*fair value model*) untuk properti investasi.

Dalam segi pengukuran metode inventaris, PSAK No. 14 Persediaan memungkinkan penggunaan metode *First In, First Out (FIFO)*, rata-rata tertimbang, dan metode khusus lainnya. PSAK No. 14 (Revisi 2008) adalah standar yang mengatur tentang Persediaan. PSAK ini memungkinkan penggunaan berbagai metode penilaian persediaan, termasuk *FIFO* rata-rata tertimbang (*weighted average*), dan metode khusus lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan praktik akuntansi entitas. Sementara VAS No. 2 mengatur tentang "Persediaan" hanya memperbolehkan penggunaan metode *FIFO* dan rata-rata tertimbang, yaitu *FIFO* dan rata-rata tertimbang (*weighted average*). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian persediaan dilakukan dengan cara yang konsisten dan memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Vietnam.

Secara keseluruhan, perbedaan dalam standar akuntansi antara Indonesia dan Vietnam mencerminkan preferensi dan regulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) cenderung memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada entitas dalam penerapan standar, sementara *Vietnamese Accounting Standard (VAS)* sering kali lebih spesifik dan mengatur dengan lebih rinci dalam beberapa aspek akuntansi. Pengetahuan mendalam tentang perbedaan ini penting bagi entitas yang beroperasi di kedua negara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan untuk menyajikan informasi keuangan secara akurat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Memahami nuansa ini dapat membantu entitas dalam mengelola risiko kepatuhan dan memaksimalkan nilai informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan masing-masing negara.

SIMPULAN

Globalisasi telah menjadi penggerak perdagangan internasional yang signifikan, mendorong penerapan praktek akuntansi internasional oleh perusahaan di seluruh dunia. Standar akuntansi internasional seperti *IFRS* telah menjadi alat penting untuk menciptakan transparansi dan kemudahan dalam komunikasi keuangan antar negara. Hal ini penting untuk memfasilitasi ekspansi bisnis lintas batas, investasi asing, dan kerjasama internasional, mengingat kompleksitas akuntansi yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dan investasi dengan menyediakan kerangka kerja akuntansi yang lebih konsisten dan dapat dibandingkan secara global.

Perbedaan dalam standar akuntansi antara negara, seperti yang terlihat antara Indonesia dan Vietnam, menciptakan tantangan tersendiri bagi para investor dan perusahaan multinasional. Indonesia dengan SAK yang sedang berproses konvergensi dengan *IFRS* dan Vietnam dengan pendekatan yang lebih bertahap melalui *VAS*, mencerminkan perbedaan dalam adopsi dan adaptasi terhadap standar akuntansi internasional. Hal ini menyiratkan pentingnya pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan standar ini untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lintas batas. Dengan demikian, adaptasi dan konvergensi terhadap *IFRS* menjadi unsur penting dalam mendorong integrasi ekonomi global.

Oleh karena itu, penerapan dan konvergensi terhadap standar akuntansi internasional, khususnya *IFRS*, menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi perdagangan dan investasi. Proses ini tidak hanya menciptakan peluang bagi perusahaan untuk beroperasi

dalam lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel tetapi juga mengatasi tantangan akuntansi dan regulasi yang dihadapi oleh investor asing. Kajian komparatif mengenai praktik akuntansi di Indonesia dan Vietnam menawarkan wawasan berguna terkait dengan cara negara-negara dapat bersiap menghadapi dinamika global ini, menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami efek praktik akuntansi terhadap perdagangan internasional dan investasi, dan upaya dalam meningkatkan standardisasi dan harmonisasi akuntansi di tingkat internasional.

Referensi :

- Adiputra, I. M. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal, Terhadap Efisiensi Investasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(3), 293–312. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i3.3965>
- Amrih, M., Hutnaleontina, P. N., Azizah, N. L., Pantjaningsih, P., Zuliyana, M., Muliati, N. K., Ghozali, Z., Hariyanti, T. P., Satriya, I. W. B., & Judijanto, L. (2024). *Pendidikan Akuntansi: Teori Komprehensif*.
- Amrin, A., Khairusoalihin, K., & Muthoifin, M. (2021). Tax Modernization in Indonesia: Study of Abu Yusuf'S Thinking on Taxation in the Book of Al-Kharaj. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 30–42. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16792>
- Andriani, Y., Sucipto, & Orinaldi, M. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Nipah Panjang. *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam*, VII(1).
- Bernadetta Diana Nugraheni, & Cyrillius Martono. (2023). The Influence of Management Accounting Information Systems and Organizational Culture on Firm Performance: Survey of Start-Ups in the Java Island Region, Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(12), 5958–5962. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i12-22>
- Budianto, R., Latifah, S. W., Suhardianto, N., & Iswati, S. (2023). Budaya Akuntansi Indonesia: Praktik Akuntansi Level Keluarga, Masyarakat, dan Bisnis. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 63–78. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.23637>
- Chandra, B., & Junita, N. (2021). Tata kelola perusahaan dan manajemen laba terhadap kebijakan dividen di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(1), 15–26. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i1.5188>
- Chauhan, Y., & Kumar, S. B. (2019). Does accounting comparability alleviate the informational disadvantage of foreign investors? *International Review of Economics and Finance*, 60(March 2018), 114–129. <https://doi.org/10.1016/j.jref.2018.12.018>
- Dao, N. G., & Hoang, H. P. (2023). Changes in Accounting Regulations Toward IFRS and Value Relevance of Accounting Information- Evidence from Vietnamese Listed Firms. *Journal of Economic and Banking Studies*, 05(5), 53–68. <https://doi.org/10.59276/jebis.2023.06.2409>
- De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A Review of the IFRS Adoption Literature. In *Review of Accounting Studies* (Vol. 21, Issue 3). <https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1>
- Dinh, T. T. H., & Tri, N. G. (2023). Research To Complete the Legal Framework for Development of Vietnam'S Stock Market To Meet International Trends. *Russian Law Journal*, 11(3), 1646–1653. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1820>
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan internasional*. Deepublish.
- Djambakieva, G. (2021). Accounting for Financial Instruments: The Main Differences According to National Accounting Standards of Uzbekistan and IFRS. *Bulletin of Science and Practice*.
- Doan, D. T., Nguyen, L. N. T., & Phan, H. T. (2020). Factors Affecting the Application of IFRS through the Perceptions of Business Managers and Auditors in Vietnam. *Problems and Perspectives in Management*, 18(1), 371–384. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(1\).2020.32](https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.32)
- Duy, N. V., & Tran, T. Q. (2021). The Influence of International Standards on SME Tax

- Compliance in Vietnam. *Finance Research Letters*, 40(May), 101750. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101750>
- Edi, E., Basri, Y. Z., & Arafah, W. (2020). CEO Characteristics, Firm Reputation and Firm Performance After Merger and Acquisition. *Business: Theory and Practice*, 21(2), 850–858. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.12782>
- Edi, E., & Wati, E. (2022). Measuring Intangible Asset: Firm Reputation. *Business: Theory and Practice*, 23(2), 396–407. <https://doi.org/10.3846/btp.2022.15945>
- Ertuğrul, M. (2019). A Review of the Literature on IFRS Adoption From the Perspective of the Value Relevance. *Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making*.
- Fandi Prasetya. (2023). The Journey of Indonesian Government Accounting. *Accounting and Management Journal*, 7(1), 84–94. <https://doi.org/10.33086/amj.v7i1.3954>
- Goncharova, V. (2020). ACCOUNTING IN FOREIGN COUNTRIES. *Zaporizhzhya National University*, 4(48), 49–54.
- Hajdari, B. (2019). Financial Statements in Individual Businesses. *American Journal of Operations Management and Information Systems*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.11648/j.ajomis.20190402.12>
- Hamdani, Z., & Husain, B. (2023). The Curriculum of ELT Education in Indonesian and Vietnamese Universities: A Comparison Study. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*, 11(1), 181–195. <https://doi.org/10.24256/ideas.v11i1.3940>
- Hoang, T. C., & Joseph, D. M. (2019). The effect of new corporate accounting regime on earnings management: Evidence from Vietnam. *Journal of International Studies*, 12(1), 93–104. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/6>
- IFRS Accounting. (2016). *IFRS Foundation*.
- Imanuel, A. A., Pribadiyono, & Riduwan, A. (2023). *Strategi Manajemen Vietnam Ulasan dari Perspektif Foucault*.
- Indonesia, I. A. (2024a). *SAK Indonesia Update - PSAK Berlaku Efektif 2024 dan Setelahnnya*. <https://Web.Iaiglobal.or.Id/>. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/sak_indonesia_update_-_psak_berlaku_efektif_2024_dan_setelahnnya#gsc.tab=0
- Indonesia, I. A. (2024b). *Sejarah Perkembangan*.
- Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. *British Accounting Review*, 51(5). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.06.001>
- Le, T. T. O., Bui, T. N., Tran, T. T. P., & Nguyen, Q. H. (2020). Factors Affecting the Application of Management Accounting in Vietnamese Enterprises. *Uncertain Supply Chain Management*, 8(2), 403–422. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.10.003>
- Lenzi, I. (2022). Early contemporary art in Vietnam: Đổi Mới shift as spur of innovation in globalizing 1990s-Hanoi. *The Russian Journal of Vietnamese Studies*.
- Li, H. (2023). Investigating the course of the ‘Innovation and Opening Up’ model in Vietnam. *BCP Business & Management*, 41, 78–88. <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v41i.4414>
- Maak, A. Y., Kerihi, A. S. Y., Pau, S. P. N., Fakultas Ekonomi dan Bisnis, U. N. C. sarlin. pau@staf. undana. ac. i., & ABSTRAK. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*, 11(4), 1–54. http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf
- Manoj, H. R., Shalini, K., & Chitra, L. J. (2023). Empirical Study on International Accounting Standards and Accounting Quality. *REST Journal on Banking, Accounting and Business*, 2(3), 11–15. <https://doi.org/10.46632/jbab/2/3/2>
- Mita, A. F., Utama, S., Fitriany, F., & Wulandari, E. R. (2018). The Adoption of IFRS, Comparability of Financial Statements and Foreign Investors’ Ownership. *Asian Review of Accounting*, 26(3), 391–411. <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2017-0064>

- Nawangarsari, A. T., & Hanun, N. R. (2020). Perkembangan Penelitian Sejarah Akuntansi di Indonesia dalam Bingkai Perspektif NAH. *Journal of Accounting Science*, 4(2), 57–69. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i2.894>
- Nguyen, A. T., & Gong, G. (2014). Measurement of Formal Convergence of Vietnamese Accounting Standards with IFRS. *Australian Accounting Review*, 24(2), 182–197. <https://doi.org/10.1111/auar.12033>
- Nguyen, D. T., Nghiem, T. T., Tran, T. L., Nguyen, D. H., & Nguyen, T. L. H. (2022). Determining Factors Affecting the Transition of Financial Statement Preparation from VAS to IFRS in Enterprises in Vietnam. *Accounting*, 8(3), 303–314. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.11.003>
- Nguyễn Thị Hải Hà và cộng sự. (2022). Applying International Financial Reporting Standards (IFRS) and Challenges to Vietnamese Enterprises. *VNU University of Economics and Business*, 2(1), 12–20.
- Nguyen, V. T. H., Nguyen, C. T., Mai, A. N., & Dao, H. N. (2023). Benefits and Costs of Adopting International Financial Reporting Standards. *International Journal of Management and Sustainability*, 12(2), 105–113. <https://doi.org/10.18488/11.v12i2.3279>
- Palea, V. (2018). Financial Reporting for Sustainable Development: Critical Insights into IFRS Implementation in the European Union. *Accounting Forum*, 42(3), 248–260. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.08.001>
- Phu, G. N., & Lan, P. N. T. (2021). Evaluation of the pre-adoption period IFRS in Vietnam - Difficulties and factors affecting the application of IFRS. *Journal of Trade Science*.
- Pohan, G. A. A., Priyono, F. J., & Priyono, E. A. (2023). Application of Principle Full Disclosure and Legal Protection for Investor Due To Market Manipulation of Shareprices By Issuers in Capital Market. *Crepido*, 5(1), 104–115. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.104-115>
- Polzer, T., Grossi, G., & Reichard, C. (2022). Implementation of the international public sector accounting standards in Europe. Variations on a global theme. *Accounting Forum*, 46(1), 57–82. <https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1920277>
- Pramudya, A. (2023). 8 Jenis Sertifikasi Akuntansi Dan Cara Mendapatkannya! Mekari Jurnal.
- Purba, K. A., & Dewayanto, T. (2023). Penerapan Artificial Intelligence, Machine Learning Dan Deep Learning Pada Kurikulum Akuntansi-a Systematic Literature Review. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–15.
- Putra, A., Tobing, H., Rahajeng, O., & Yuhan, R. (2023). The Indonesian Journal of Social Studies. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 2(2), 37–45.
- Saveleva, V. R. (2021). INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. *Наука XXI Века: Актуальные Направления Развития*.
- Shira, D. (2021). Vietnam Accounting Standard. *Vietnam Briefing*.
- Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2016). IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review. *European Accounting Review*, 16(4), 675–702. <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rear20%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1080/09638180701706732>
- Song, X. & M. T. (2020). The Historical and Current Status of Global IFRS Adoption: Obstacles and Opportunities for Researchers. *The International Journal of Accounting*. <https://doi.org/10.1142/S1094406022500019>
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (2015). *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Subhan, S. (2023). Science and Technology for the Community Compilation of Financial Statements Based on SAK ETAP. *Advances in Community Services Research*, 1(1), 29–31. <https://doi.org/10.60079/acsr.v1i1.53>
- Tandiono, R., Ratnawati, A. T., Gusneli, Ilham, Martini, R., Waty, E., Putuhena, H., AR, M., & Devi, E. K. (2023). *TEORI AKUNTANSI : Konsep, Aplikasi, dan Implikasi*.
- Thanh, P. N. T., Thanh, H. P., Thanh, T. N., & Thuy, T. V. T. (2020). Factors Affecting Accrual Accounting Reform and Transparency of Performance in the Public Sector in Vietnam. *Problems and Perspectives in Management*, 18(2), 180–193.

- [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(2\).2020.16](https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.16)
- Thi, N. B., Anh, T. C., & Tu, O. L. T. (2020). The Implication of Applying IFRS in Vietnamese Enterprises from an Expert Perspective. *Management Science Letters*, 10(3), 551–564. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.9.025>
- Tri Wahyuni, E., Puspitasari, G., & Puspitasari, E. (2020). Has IFRS improved Accounting Quality in Indonesia? A Systematic Literature Review of 2010-2016. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2101135>
- Tyas, S. W., Febbi Valentya, G., Fajar Aditama, M., & Nidaul Husna, L. A. (2023). International Trade in the Era of Globalization. *ASIAN Economic and Business Development*, 6(1), 65–71. <https://doi.org/10.54204/aebd/vol6no1august2023009>
- Vietnam Association of Certified Public Accountants. (2024). International Federation of Accountants.
- Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: an Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>
- Wardoyo, D. U., Rahadiansyah, D. T. C., Ayuningtias, S. N., Rahmadiyah, D. A., & Putri, S. A. (2023). Mengenal perspektif historis dan modern accounting. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 95–101. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8070>
- Wulandari, T., Saputri, N., Laili, R. F. N., NurIfitriani, S., & FirdausiiMustoffa, A. (2023). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23. 9(1), 356–363.
- Yanti, E. M., & Ramzijah, R. (2023). Dampak International Financial Reporting Standard (IFRS) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekobismen*, 3(1), 45–51. <https://doi.org/10.47647/jeko.v3i1.1040>